



OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DAERAH DALAM RANGKA MEMINIMALISASI FLYPAPER EFFECT DI INDONESIA

Arsanty Triya Rahayuni¹

¹Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

Email : arsantytriya@gmail.com

Rida Perwita Sari²*

²Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur

*Corresponden Author Email : ridaps.ak@upnjatim.ac.id

Diterima : 7 Juni 2021

Direvisi : 20 Juni 2021

Dipublikasikan : 1 September 2021

Abstrak

Pemerintah daerah cenderung menggunakan dana yang pemerintah pusat berikan untuk memenuhi kebutuhan daerahnya daripada mengoptimalkan pendapatan asli daerah. Dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat mengakibatkan beberapa daerah mengalami flypaper effect. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui optimalisasi pendapatan asli daerah pada pemerintah daerah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan kualitatif atas data yang berkaitan dengan Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan yang sudah terpublikasi pada laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) periode 2014-2018. Sampel dalam penelitian ini adalah 81 Kabupaten/Kota dari 5 pulau terbesar di Indonesia. Hasil penelitian ini adalah Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah tertinggi dalam periode 2014-2018 di kabupaten dan kota diantara 5 pulau di Indonesia dalam periode 2014-2018 dicapai oleh pulau Sulawesi sebesar yaitu 28%, Rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten dan kota yang tertinggi diantara 5 pulau terbesar di Indonesia dalam periode 2014-2018 adalah Papua yaitu sebesar 128%, Rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di 5 pulau terbesar di Indonesia dalam periode 2014-2018 tergolong sangat rendah, Rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten dan kota di 5 pulau terbesar di Indonesia dalam periode 2014-2018 tertinggi adalah pulau Sulawesi sebesar 93,2%.

Keywords: *optimalisasi, pendapatan asli daerah, dana perimbangan.*

PENDAHULUAN

Indonesia sudah memasuki dua dekade dalam menerapkan otonomi daerah. Sejak saat itu juga pemerintah daerah diberikan hak untuk mengurus sendiri daerahnya. Dengan diberikannya hak tersebut secara otomatis pemerintah daerah mempunyai wewenang dalam membuat keputusan yang berhubungan dengan daerah kekuasaannya. Pemerintah pusat melakukan transfer ke daerah yang meliputi transfer dana perimbangan, transfer dana otonomi khusus dan penyesuaian sebagai komitmennya pada pemerintahan daerah dalam melaksanakan desentralisasi fiskal.

Suatu daerah dikatakan mampu atau tidaknya dalam berotonomi dapat dilihat pada kemampuan keuangan daerah (Tulandi et al., 2020). Artinya, daerah otonom harus menggunakan kewenangan dan kemampuan yang dimiliki untuk menggali sumber keuangannya sendiri, mengelola dan menggunakan potensi-potensi pada daerahnya untuk meningkatkan keuangan daerahnya hingga mampu untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Suatu daerah dapat dikatakan otonom, apabila PAD yang disumbangkan pada pendapatan daerah di APBD sekitar 30%. Dalam APBD salah satu pendapatan daerah yang termasuk transfer dari pusat adalah dana perimbangan. Dana tersebut diadakan

bertujuan untuk pemeratakan kemampuan keuangan daerah yang ada di Indonesia. Subsidi dana yang diberikan oleh pemerintah pusat mengakibatkan beberapa daerah di Indonesia mengalami *flypaper effect*.

Flypaper effect merupakan keadaan dimana pemerintah daerah dalam merespon belanja lebih boros ketika mendapatkan dana transfer dari pusat daripada memaksimalkan pendapatan asli daerahnya. Akan tetapi keadaan ini tidak dapat digeneralisasikan karena setiap daerah memiliki perbedaan karakteristik dari berbagai aspek, baik dari aspek ekonomi, demografi dan kondisi geografisnya (Ansori & Muthmainah, 2018). Menurut Subadriyah (2017) terjadinya fenomena *flypaper effect* dikarenakan kurang efektifnya sistem penentuan dana perimbangan dari pusat ke daerah. Hal ini menyebabkan daerah lebih cenderung menggunakan transfer dari pusat tanpa mengeksplorasi PAD secara optimal (Ekawarna, 2017).

Dalam meningkatkan PAD selain dengan mengoptimalkan potensi daerah yang ada pemerintah daerah juga dapat memperoleh pendapatan yang dipungut berdasarkan peraturan daerah yang ada. Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 pendapatan asli daerah merupakan pendapatan yang dihasilkan dari sumber asli daerah tersebut, dengan dipungut dari pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Pendapatan Asli Daerah perlu dioptimalkan dengan tujuan untuk mewujudkan daerah yang mandiri dan mampu untuk membiayai sendiri daerahnya serta memperkuat struktur keuangan daerah (Pattilouw, 2018).

KAJIAN PUSTAKA

Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Menurut Undang-Undang No. 33 tahun 2004 pendapatan asli daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu dari pendapatan daerah yang dimana dengan adanya aturan tersebut, Kepala Daerah dapat meningkatkan PAD guna mengurangi ketergantungan dari Pemerintah (Kamal, 2019).

Dana Perimbangan

Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan keuangan menjelaskan bahwa dana perimbangan merupakan dana yang diberikan pemerintah pusat dari pendapatan APBN yang kemudian diterima oleh pemerintah daerah untuk membiayai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.

Djaenuri (2012, p. 100) mengemukakan bahwa dana perimbangan merupakan sumber pendapatan daerah yang berasal dari pemerintah pusat yang bertujuan untuk mendukung pemerintah daerah dalam melaksanakan otonomi daerah, antara lain untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat.

Dana perimbangan terdiri atas :

a. Dana Bagi Hasil (DBH)

Dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 menjelaskan dana bagi hasil adalah pemberian sebagian persentase (%) pendapatan nasional dari suatu sumber tertentu kepada pemerintah daerah yang memperoleh pendapatan tersebut. Dana bagi hasil bisa berupa bagi hasil pajak dan bagi hasil non-pajak atau bagian daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan, dan penerimaan dari sumber daya alam.

b. Dana Alokasi Umum (DAU)

Dana alokasi umum adalah dana yang diberikan pemerintah pusat dari pendapatan APBN yang dialokasikan pada pemerintah daerah bertujuan untuk pemeratakan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi sebagaimana seperti yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004.

c. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Dalam Pasal 1 ayat 23 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Keuangan Pusat dan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa DAK adalah dana yang diberikan oleh pemerintah pusat dan bersumber dari pendapatan APBN yang

dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Mahmudi (2019, p. 170) mengemukakan bahwa rasio kemandirian keuangan daerah dihitung dengan membandingkan jumlah pendapatan asli daerah dibagi dengan jumlah pendapatan transfer dari pemerintah pusat atau provinsi dan pinjaman daerah. Jika angka rasio ini semakin tinggi maka dapat dinyatakan bahwa pemerintah daerah tersebut memiliki tingkat kemandirian yang tinggi. Berikut ini merupakan rumus rasio untuk mengukur kemandirian keuangan daerah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Adapun tingkat kemampuan daerah berdasarkan rasio kemandirian sebagai berikut :

Tabel 1. Tingkat Kemampuan Daerah Berdasarkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian (%)	Kemampuan Daerah
0-25	Rendah Sekali
25-50	Rendah
50-75	Sedang
75-100	Tinggi

Sumber : Halim, (2014, p. 189)

Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Menurut Mahmudi (2019, p. 140) Semakin tinggi rasio ini maka semakin besar tingkat ketergantungan pemerintah daerah terhadap pemerintah pusat. Rasio ketergantungan keuangan daerah didapatkan dari Pendapatan Transfer dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain. Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Ketergantungan adalah :

$$\text{Rasio Ketergantungan} = \frac{\text{Dana Perimbangan}}{\text{Total Pendapatan Daerah}}$$

Adapun tingkat kemampuan daerah berdasarkan rasio ketergantungan sebagai berikut :

Tabel 2. Tingkat Kemampuan Daerah Berdasarkan Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio Ketergantungan (%)	Kemampuan Daerah
0-10	Sangat Rendah
10,1-20	Rendah
20,1-30	Cukup Rendah
30,1-40	Sedang
40,1-50	Tinggi
>50	Sangat Tinggi

Sumber : Tim Litbang Depdagri-Fisipol UGM, 1991

Rasio Efektifitas PAD

Mahmudi (2019, p. 170) Rasio Efektivitas PAD menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam memobilisasi penerimaan PAD sesuai dengan yang ditargetkan. Rasio Efektivitas PAD dihitung dengan cara membandingkan realisasi penerimaan PAD dengan target penerimaan PAD atau yang dianggarkan sebelumnya. Adapun rumus Rasio Efektivitas sebagai berikut:

$$\text{Rasio Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi PAD}}{\text{Target PAD}}$$

Adapun tingkat kemampuan daerah berdasarkan rasio efektifitas sebagai berikut :

Tabel 3. Tingkat Kemampuan Daerah Berdasarkan Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio Efektivitas (%)	Kemampuan Daerah
>100	Sangat Efektif
100	Efektif
90-99	Cukup Efektif
75-89	Kurang Efektif
<75	Tidak Efektif

Sumber : Mahmudi, (2010, p. 142)

Rasio Pertumbuhan PAD

Rasio pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui pemerintah daerah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi, 2010, p. 138). Adapun rumus pertumbuhan:

$$\text{Rasio Pertumbuhan} = \frac{P_n - P_0}{P_0} \times 100\%$$

Keterangan:

P_n = Total PAD tahun ke n

P_0 = Total PAD tahun sebelum n

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) dengan pendekatan kualitatif. Menurut Krippendorff (1993, p. 15) analisis isi adalah teknik penelitian digunakan untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan shahih datanya dengan cara memerhatikan isi datanya, sedangkan inferensi merupakan kegiatan memaknai data sesuai dengan konteks. Penelitian ini menggunakan data penelitian pada tahun 2014-2018 karena terdapat peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Indonesia diiringi dengan peningkatan Dana Perimbangan.

Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk dokumen dan lebih memanfaatkan data dokumen yang didapatkan dari sumber data sekunder daripada sumber-sumber primer, sehingga peneliti harus melakukan analisis secara mendalam untuk memaknai teks atau dokumen yang telah dibentuk atau dikumpulkan.

Teknik Analisis Data

Pada penelitian yang menggunakan metode analisis isi (*content analysis*) terdapat empat tahapan yang harus dilakukan ketika akan melakukan analisis data yaitu :

1. Pembentukan Data

a. Penentuan Unit Analisis (Unitisasi)

Pada tahap ini peneliti akan menentukan unit-unit yang akan diteliti. Dalam penelitian ini unit-unit tersebut adalah Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Perimbangan.

b. Penentuan Sampel

Penelitian ini menggunakan teknik *proportionate stratified random sampling*. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh kabupaten dan kota yang berada di 5 Pulau terbesar di Indonesia. Jumlah populasi adalah 434 kabupaten dan kota. Penelitian ini menggunakan rumus Taro Yaname dan Slovin untuk menentukan jumlah sampel sebagai berikut :

$$n = \frac{N}{1 + N(e^2)}$$

Keterangan :

n = Jumlah sampel seluruhnya

N = Jumlah populasi seluruhnya

e^2 = Presisi

Presisi yang digunakan adalah 10%, maka :

$$\begin{aligned}n &= \frac{434}{1+434(0,1^2)} \\ &= \frac{434}{5,34} \\ &= 81\end{aligned}$$

Sampel yang diambil pada setiap stratum dihitung dengan rumus alokasi proporsional sebagai berikut :

$$n_i = \frac{N_i}{N} \times n$$

Keterangan :

n_i = Jumlah sampel setiap stratum

n = Jumlah sampel seluruhnya

N_i = Jumlah populasi setiap stratum

N = Jumlah populasi seluruhnya

Maka jumlah sampel pada setiap stratum sebagai berikut :

$$\text{Sumatera} = \frac{150}{434} \times 81 = 28$$

$$\text{Jawa} = \frac{113}{434} \times 81 = 21$$

$$\text{Kalimantan} = \frac{48}{434} \times 81 = 9$$

$$\text{Sulawesi} = \frac{81}{434} \times 81 = 15$$

$$\text{Papua} = \frac{42}{434} \times 81 = 8$$

Kemudian sampel tersebut akan dipilih secara acak dengan mengundi nama kabupaten dan kota pada setiap pulau sesuai dengan jumlah sampel yang sudah ditentukan.

c. Pengumpulan dan Pencatatan Data

Tahap selanjutnya yang harus dilakukan setelah melakukan unitisasi dan sampling yaitu pengumpulan dan pencatatan data. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi.

2. Reduksi Data

Herdiansyah (2010, p. 165) mengemukakan bahwa reduksi data merupakan proses penggabungan dan menyeragamkan semua data yang telah dikumpulkan agar mudah diteliti. Pada tahap ini, peneliti memeriksa kembali kelengkapan dan kesesuaian data yang sudah dibentuk secara detail dan teliti.

3. Penarikan Inferensi

Penarikan inferensi adalah kegiatan pemaknaan yang tergantung pada konteks data. Dalam tahap ini diperlukan sensitifitas yang tinggi untuk memaknai konteks data yang akan diteliti.

4. Analisis Data

Sugiyono (2016, p. 60) mengemukakan analisis data merupakan mengelompokkan dan mengurutkan data kedalam ketentuan yang ada untuk memperoleh hasil yang sesuai dengan data yang didapatkan. Hal yang perlu dilakukan dalam tahap ini adalah : (1) Meringkas data, agar apa yang diresentasikan dapat dipahami, dan diinterpretasikan dengan baik. (2) Menemukan berbagai pola dan keterkaitan dalam data yang sulit diamati dengan mata telanjang. (3) Menghubungkan data yang diperoleh dari analisis isi dengan data yang diperoleh dari metode atau situasi lain.

Sumber dan Jenis Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data sekunder. Berdasarkan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data

yang tersedia pada portal data pada laman resmi Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tingkat Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah

Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah didapatkan dengan cara membandingkan pendapatan asli daerah tahun ke-n dikurangi pendapatan asli daerah tahun sebelum n. Berikut ini merupakan rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia :

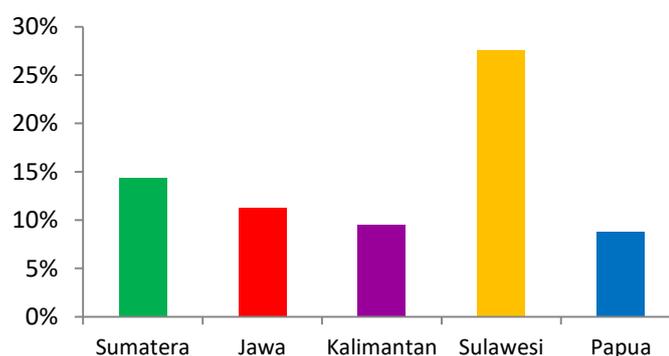
Tabel 4. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan Rasio Pertumbuhan Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia Periode 2014-2018

Tahun	Realisasi PAD (Dalam Jutaan Rupiah)	Rasio Pertumbuhan
2014	200,504,643	-
2015	215,376,545	7%
2016	229,340,355	6%
2017	274,032,669	19%
2018	272,981,058	-0,4%
Rata-rata		8%

Sumber: DJPK, 2021 (Data Diolah)

Pada tahun 2015, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah di seluruh kabupaten dan kota sebesar 7% dari tahun sebelumnya, yang kemudian mengalami penurunan menjadi 6% pada tahun 2016, namun terjadi peningkatan realisasi pendapatan asli daerah sebesar 13,963,810 (dalam jutaan rupiah). Peningkatan yang cukup tinggi dari tahun sebelumnya yang terjadi pada tahun 2017 yaitu sebesar 19% dengan selisih 44,692,314 (dalam jutaan rupiah) dari tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2018 pertumbuhan pendapatan asli daerah di seluruh kabupaten dan kota negatif sebesar 0,4%. Hal ini dikarenakan adanya penurunan dalam merealisasikan pendapatan asli daerah yaitu sebesar 1,051,611 (dalam jutaan rupiah).

Berikut ini merupakan rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah kabupaten dan kota yang ada di 5 pulau terbesar di Indonesia :



Sumber : Penulis, 2021 (Data Diolah)

Gambar 1. Rata-Rata Rasio Pertumbuhan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Dan Kota di 5 Pulau Terbesar di Indonesia Periode 2014-2018

Pada gambar 1 dapat dilihat bahwa rata-rata tertinggi rasio pertumbuhan PAD dalam periode 2014-2018 pada kabupaten dan kota diantara 5 pulau terbesar di Indonesia dicapai oleh pulau Sulawesi sebesar 28%. Sedangkan Sumatera memiliki rasio pertumbuhan PAD lebih besar 3% dari Jawa yaitu sebesar 14%. Kalimantan dan Papua berada diposisi terendah dengan rasio pertumbuhan yang sama yaitu 9%.

Dalam Penelitian Takaria & Ardini (2017) Selama tahun 2013-2015 realisasi PAD yang dihasilkan oleh Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan memenuhi anggaran. Adanya peningkatan realisasi PAD 2013-2015 tidak terlepas dari usaha Pemerintah kota Surabaya untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah, dimana pelaksanaannya dilakukan melalui intensifikasi dan ekstensifikasi. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Penelitian yang dilakukan oleh Magfiroh & Fitria (2019) memiliki hasil yang berbeda. Dalam penelitian tersebut selama 4 periode berjalan mulai Tahun 2013-2016 di Lamongan realisasi PAD sudah optimal namun pada tahun 2017 realisasi PAD mengalami penurunan sebesar 2,25% dengan pencapaian hanya sebesar 98,32%. Penerimaan pada PAD hanya mampu memberikan kontribusi dana sebesar 10-15% terhadap Belanja Pembangunan, dan kekurangan senilai 85% ditanggung oleh pemerintah pusat dan pemerintah provinsi melalui Dana perimbangan.

Tingkat Efektifitas Pendapatan Asli Daerah

Rasio efektifitas pendapatan asli daerah didapatkan dengan cara membandingkan realisasi dengan target dari pendapatan asli daerah. Berikut ini merupakan realisasi dan target pendapatan asli daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia :

Tabel 5. Realisasi dan Target Pendapatan Asli Daerah Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia Periode 2014-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Target PAD
2014	200,504,643	180,675,174
2015	215,376,545	174,314,915
2016	229,340,355	229,399,260
2017	274,032,669	243,006,285
2018	272,981,058	269,908,544

Sumber: DJPK, 2021

Berdasarkan data realisasi dan target pendapatan asli daerah di tabel 2 dapat diketahui rasio efektifitas dan tingkat kemampuan daerah kabupaten dan kota di Indonesia pada periode 2014-2018 sebagai berikut

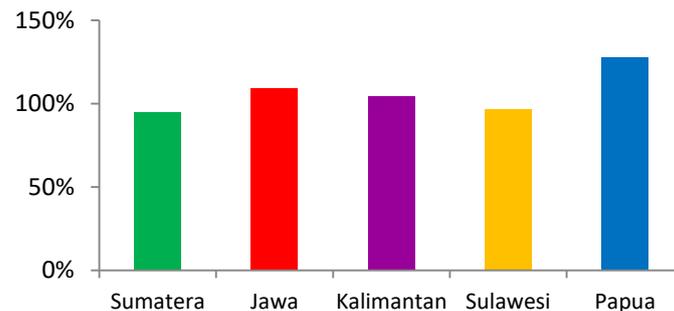
Tabel 6. Rasio efektifitas dan Tingkat kemampuan daerah Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia Periode 2014-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Rasio Efektifitas	Kemampuan Daerah
2014	111%	Sangat Efektif
2015	124%	Sangat Efektif
2016	100%	Efektif
2017	113%	Sangat Efektif
2018	101%	Sangat Efektif
Rata-rata	110%	Sangat Efektif

Sumber: Penulis, 2021 (Data Diolah)

Pada tahun 2014, rasio efektifitas pendapatan asli daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia yaitu sebesar 111%, angka rasio tersebut tergolong sangat efektif karena melebihi 100%. Di tahun 2016 terjadi penurunan dari 124% menjadi 100% , sehingga tingkat kemampuan daerahnya menurun dari “sangat efektif” menjadi “efektif”. Walaupun mengalami penurunan rata-rata rasio efektifitas selama 2014-2018 tergolong sangat efektif maka dapat disimpulkan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Indonesia rata-rata telah sangat efektif dalam mengelola pendapatan asli daerah.

Berikut ini merupakan rata-rata rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten dan kota di 5 pulau terbesar di Indonesia selama 5 tahun :



Sumber : Penulis, 2021 (Data Diolah)

Gambar 2. Rata-Rata Rasio Efektifitas Pendapatan Asli Daerah 5 Pulau Terbesar di Indonesia Pada Periode 2014-2018

Pada gambar 2 dapat dilihat bahwa rata-rata rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten dan kota yang tertinggi diantara 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Papua yaitu sebesar 128%. Angka rasio efektifitas tersebut tergolong sangat efektif, dapat disimpulkan bahwa Papua telah sangat efektif dalam mengelola pendapatan asli daerahnya. Rasio efektifitas pada pulau Jawa dan Kalimantan tergolong masih sangat efektif karena melebihi 100% yaitu sebesar 109% dan 104%. Sumatera dan Sulawesi memiliki rasio efektifitas sebesar 95% dan 97% yang tergolong efektif dalam mengelola pendapatan asli daerah.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ariyanti dan Yudhaningsih (2020) tingkat efektivitas pajak daerah sangat efektif dengan rata-rata sebesar 126,49%, kriteria kontribusi pajak daerah terhadap pendapatan asli daerah cukup baik dengan rata-rata sebesar 30,47%, hasil dari analisis regresi menunjukkan hasil yang positif artinya bertumbuhnya jumlah penerimaan Pajak Daerah akan mengakibatkan bertumbuhnya Pendapatan Asli Daerah, dan hasil dari analisis korelasi menunjukkan bahwa pajak daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Kendal memiliki hubungan yang sangat kuat dengan koefisien r sebesar 0,89 sehingga apabila pajak daerah mengalami kenaikan maka Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal juga akan mengalami kenaikan.

Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian daerah didapatkan dengan cara membandingkan realisasi pendapatan daerah dengan total pendapatan daerah. Berikut ini merupakan realisasi pendapatan daerah dan total pendapatan daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia :

Tabel 7. Realisasi Pendapatan Asli Daerah dan total pendapatan daerah Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia Periode 2014-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Realisasi PAD	Pendapatan daerah
2014	200,504,643	835,171,441
2015	215,376,545	903,374,167
2016	229,340,355	1,003,137,004
2017	274,032,669	1,078,567,534
2018	272,981,058	1,110,964,488

Sumber: DJPK, 2021

Berdasarkan data realisasi pendapatan asli daerah dan pendapatan daerah di tabel 4 dapat diketahui rasio kemandirian keuangan daerah dan tingkat kemampuan daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada periode 2014-2018 sebagai berikut :

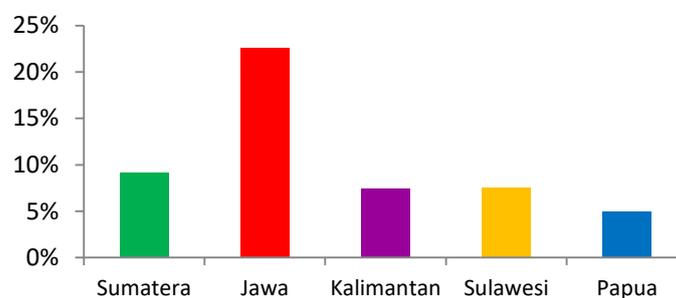
Tabel 8. Rasio Kemandirian dan Tingkat Kemampuan Daerah Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia Periode 2014-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Rasio Kemandirian	Kemampuan Daerah
2014	24%	Rendah Sekali
2015	24%	Rendah Sekali
2016	23%	Rendah Sekali
2017	25%	Rendah Sekali
2018	25%	Rendah Sekali
Rata-rata	24%	Rendah Sekali

Sumber: Penulis, 2021 (Data Diolah)

Rasio kemandirian keuangan daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada tahun 2014 dan 2015 yaitu sebesar 24%, tahun 2016 sebesar 23%, tahun 2017 dan 2018 sebesar 25%. Dalam 5 tahun, seluruh kabupaten dan kota di Indonesia memiliki rata-rata sebesar 24% dengan tingkat kemampuan daerah tergolong rendah sekali. Hal ini disebabkan karena selama 5 tahun rasio kemandirian berada diantara 0%-25%.

Berikut ini merupakan rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota di 5 pulau terbesar di Indonesia selama 5 tahun :



Sumber : Penulis, 2021 (Data Diolah)

Gambar 3. Rata-Rata Rasio Kemandirian Keuangan Daerah 5 Pulau Terbesar di Indonesia Pada Periode 2014-2018

Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah kabupaten dan kota yang tertinggi diantara 5 pulau terbesar di Indonesia dalam 5 tahun adalah pulau Jawa dengan rasio 23%. Sumatera sebesar 9%, Sulawesi sebesar 8%, Kalimantan sebesar 7%, dan Papua sebesar 5%. Rata-rata rasio kemandirian pada 5 pulau tersebut tergolong rendah sekali, sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 pulau terbesar di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun belum dapat dikatakan mandiri dalam keuangan daerahnya.

Menurut Putra dan Hidayat (2016) ciri utama suatu daerah mampu melaksanakan otonomi daerah terletak pada: (1) Kemampuan keuangan daerah, yang berarti daerah tersebut memiliki kemampuan dan kewenangan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola dan menggunakan keuangannya sendiri untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan; (2) Ketergantungan kepada bantuan pusat yang harus seminimal mungkin. Oleh karena itu Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah. Untuk melihat kemampuan keuangan daerah dalam menjalankan otonomi, salah satunya dapat diukur dengan kinerja keuangan daerah.

Tingkat Ketergantungan Keuangan Daerah

Rasio ketergantungan didapatkan dengan cara membandingkan total dana perimbangan dengan pendapatan daerah. Berikut ini merupakan dana perimbangan dan pendapatan daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia :

Tabel 8. Dana Perimbangan dan Pendapatan Daerah Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia Periode 2014-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Dana Perimbangan	Pendapatan daerah
2014	476,422,281	835,171,441
2015	485,276,827	903,374,167
2016	627,115,974	1,003,137,004
2017	638,976,079	1,078,567,534
2018	663,249,196	1,110,964,488

Sumber: DJPK, 2021 (Data Diolah)

Berdasarkan data dana perimbangan dan pendapatan daerah di tabel 6 dapat diketahui rasio ketergantungan keuangan daerah dan tingkat kemampuan daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada periode 2014-2018 sebagai berikut :

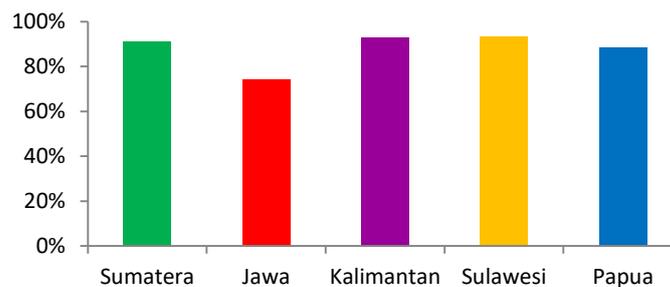
Tabel 9. Rasio Ketergantungan dan Kemampuan Daerah Seluruh Kabupaten dan Kota di Indonesia Periode 2014-2018 (Dalam Jutaan Rupiah)

Tahun	Rasio Ketergantungan	Kemampuan Daerah
2014	57%	Sangat Tinggi
2015	54%	Sangat Tinggi
2016	63%	Sangat Tinggi
2017	59%	Sangat Tinggi
2018	60%	Sangat Tinggi
Rata-rata	59%	Sangat Tinggi

Sumber: Penulis, 2021 (Data Diolah)

Rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten dan kota di Indonesia selama 5 tahun memiliki rata-rata sebesar 59% yang tergolong sangat tinggi karena lebih dari 50%. Dapat disimpulkan bahwa seluruh kabupaten dan kota di Indonesia masih mengalami ketergantungan yang sangat tinggi terhadap dana perimbangan yang diberikan oleh pemerintah pusat. Rasio tertinggi terjadi pada tahun 2016, dimana mencapai presentase sebesar 63% yang meningkat 9% dari tahun sebelumnya.

Berikut ini merupakan rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah kabupaten dan kota di 5 pulau terbesar di Indonesia selama 5 tahun :



Sumber: Penulis, 2021 (Data Diolah)

Gambar 4. Rata-Rata Rasio Ketergantungan Keuangan Daerah 5 Pulau Terbesar di Indonesia Pada Periode 2014-2018

Diantara 5 pulau terbesar di Indonesia selama 5 tahun yang memiliki rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah tertinggi adalah pulau Sulawesi. Kalimantan dan Sulawesi memiliki presentase yang hampir sama besarnya yaitu 93% dan 93,2%. Sumatera sebesar 91%, Papua sebesar 88% dan Jawa sebesar 74%. Dapat disimpulkan bahwa 5 pulau terbesar di Indonesia memiliki rata-rata rasio ketergantungan yang tergolong sangat tinggi karena lebih dari 50%.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

- Rata-rata rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia yaitu sebesar 8% pada periode 2014-2018. Pada tahun 2018, rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah di seluruh kabupaten dan kota negatif sebesar 0,4% disebabkan karena terjadi penurunan dalam realisasikan pendapatan asli daerah yaitu sebesar 1,051,611 (dalam jutaan rupiah). Rasio pertumbuhan pendapatan asli daerah tertinggi dalam periode 2014-2018 pada kabupaten dan kota diantara 5 pulau di Indonesia dicapai oleh pulau Sulawesi sebesar yaitu 28%.
- Rata-rata rasio efektifitas pendapatan asli daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada periode 2014-2018 yaitu sebesar 110%, yang tergolong sangat efektif. Rasio efektifitas pendapatan asli daerah kabupaten dan kota yang tertinggi diantara 5 pulau terbesar di Indonesia adalah Papua yaitu sebesar 128% selama 5 tahun, yang tergolong sangat efektif. Sumatera dan Sulawesi memiliki rasio efektifitas sebesar 95% dan 97%, yang tergolong efektif dalam mengelola pendapatan asli daerah.
- Rata-rata rasio kemandirian keuangan daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada periode 2014-2018 yaitu sebesar 24%, yang tergolong sangat rendah. Rata-rata rasio kemandirian pada 5 pulau tersebut tergolong rendah sekali, sehingga dapat disimpulkan bahwa 5 pulau terbesar di Indonesia dalam kurun waktu 5 tahun belum dapat dikatakan mandiri dalam keuangan daerahnya.
- Rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah seluruh kabupaten dan kota di Indonesia pada periode 2014-2018 yaitu sebesar 59%, yang tergolong sangat tinggi. Diantara 5 pulau terbesar di Indonesia selama 5 tahun yang memiliki rata-rata rasio ketergantungan keuangan daerah tertinggi adalah pulau Sulawesi sebesar 93,2%.

SARAN

1. Saran Teoritis:

- Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambah subjek penelitian lain seperti belanja daerah, pinjaman daerah, dan pengeluaran daerah yang lainnya.

2. Saran Praktis :

- Pemerintah daerah sebaiknya dapat lebih mengoptimalkan potensi-potensi yang ada pada daerahnya untuk menambah pendapatan daerah khususnya pendapatan asli daerah sehingga dapat mencapai kemandirian yang tinggi dan tidak tergantung dengan dana pemberian pemerintah pusat untuk membiayai pengeluaran daerah.

REFERENSI

- Ansori, W., & Muthmainah. (2018). Fenomena Flypaper Effect atas Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota di Pulau Bali dan Nusra. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 18(2), 151. <https://doi.org/10.20961/jab.v18i2.389>
- Ariyanti, D., & Yudhaningsih, R. (2020). Analisis Efektifitas Dan Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2014-2018. *AKTUAL*, 3(1), 65–79.
- Djaenuri, A. (2012). *Hubungan Keuangan Pusat-Daerah*. Indonesia Ghalia.
- Ekawarna, S. U. (2017). Analisis Flypaper Effect pada Belanja Daerah (Studi Komparasi Daerah Induk dan Pemekaran kabupaten / kota di Provinsi Jambi). *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 4(3), 167–184. <https://doi.org/https://doi.org/10.22437/ppd.v4i3.3639>
- Halim, A. (2014). *Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat.
- Herdiansyah, H. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif Dan Ilmu-Ilmu Sosial*. Salemba Humanika.

- Kamal, M. (2019). Hubungan Pemerintahan Daerah Dalam Mengelola Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berdasarkan Undang-Undang 23 Tahun 2014. *SIGN*, 1(1), 18–28.
- Krippendorff, K. (1993). *Analisis Isi: Pengantar Teori dan Metodologi (alih bahasa oleh Farid Wajidi)*. PT. Raja Grafindo Persada.
- Magfiroh, A. M., & Fitria, A. (2019). Optimalisasi Sumber Pendapatan Asli Daerah Dalam Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Daerah Kabupaten Lamongan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2), 1–18.
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Edisi Kedu). UPP STIM YKPN.
- Mahmudi. (2019). *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*. Sekolah Tinggi Ilmu Manajemen YKPN.
- Pattilouw, D. R. (2018). Strategi Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Buru Selatan. *Cita Ekonomika, Jurnal Ekonomi*, XII(1).
- Putra, R., & Hidayat, S. (2016). Tingkat Kemandirian Keuangan Daerah dan Hubungannya Dengan Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jambi. *Jurnal Perspektif Pembiayaan Dan Pembangunan Daerah*, 3(4), 243–256.
- Subadriyah. (2017). Flypaper Effect: Sebelum Dan Sesudah Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Akrual. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 8(3), 559–570. <https://doi.org/10.18202/jamal.2017.12.7073>
- Sugiyono. (2016). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&B*. PT Alfabet.
- Takaria, I., & Ardini, L. (2017). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pembangunan Kota Surabaya. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(11), 1–17.
- Tulandi, V., Sabijono, H., & Rondonuwu, S. (2020). Analisis Efektivitas Pajak Parkir Dan Kontribusinya Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Kotamobagu. *Jurnal EMBA*, 8(4). <https://doi.org/https://doi.org/10.35794/emba.v8i4.30835>